

Temukan Proyek Dobel Anggaran

BPK Dilibatkan Bongkar Kasus Pelabuhan Rembang

REMBANG - Panitia khusus (Pansus) DPRD Rembang segera meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi demi menyelesaikan polemik antar investor di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Hal itu

lantaran pertemuan antara Pansus dengan para investor di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (30/6) kemarin kembali gagal menemukan titik temu.

Ketua Pansus Puji Santoso mengatakan, audit BPK tersebut merupakan upaya terakhir yang ditempuh, jika tak kunjung ada kesepakatan antar investor. Sebelum hal itu dilakukan, akan dilakukan pertemuan secara tertutup yang akan digelar pekan depan. "Kami mengharapkan semua pihak yang mengambil kebijakan dipertemukan," ungkapnya.

Dia masih melihat pada pertemuan tersebut, masing-masing investor, yaitu PT Bangun Arta Kencana (BAK), PT Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK), dan PT Amir Hajar Kilsa (AHK) masih bertahan dengan klaim masing-masing terkait pengerjaan lahan reklamasi. "Semua pihak tidak bisa saling menerima, mengklaim bahwa dia punya hak sekian-sekian, jika tidak ada titik temu kita minta minta kepada BPK untuk melakukan investigasi," tegasnya.

Alih-alih menyelesaikan

polemik antar investor, audiensi yang digelar sekitar 4 jam tersebut malah mengungkap adanya dugaan terjadinya tumpang tindih anggaran yang dilakukan Prilestiyono, Direktur PT RBSJ pada pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Terminal Sluke. Salah satunya terkait pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang dibiayai APBD 2012 sebesar Rp. 470 juta.

Tidak hanya itu saja, ternyata Prilestiyono juga meminta anggaran kepada BAK sebesar Rp. 150 juta untuk membeli

alat navigasi tersebut. "Bukti transaksinya ada, dengan catatan pembelian alat, pihak penjual dan pemasangan tidak akan mengeluarkan kuitansi. Duitnya sudah disetor, Pak. padahal PT RBSJ menyatakan satu perak pun tidak pernah menerima," tutur Mindo Herbert Sitorus, Direktur Utama PT BAK.

Mindo juga menegaskan, secara historis tidak ada klaim tumpang tindih lahan hasil reklamasi. "Pansus harus tegas. Mengenai tumpang tindih lahan, tidak ada.

Yang ada tumpang tindih anggaran untuk pengurusan Amdal, navigasi, dan lainnya," tukasnya.

Menanggapi tuduhan dobel anggaran, Prilestiyono mengakui adanya permintaan dana kepada PT BAK untuk pengadaan SBNP. Namun dia berkilah, SBNP yang diajukan oleh Dinas Perhubungan tidak disetujui oleh Pemkab Rembang karena dianggap tidak layak. "Waktu itu memang ada anggaran yang 150 juta dan 470 juta. Bukan saya

yang mengusulkan, tetapi Dinas Perhubungan kepada Pemkab. Ternyata disetujui yang 470 juta," tuturnya.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Perhubungan, Suyono, SBNP sebesar Rp. 470 juta itu murni pendanaan dari APBD, tidak ada hubungannya dengan pernyataan PT RBSJ maupun PT BAK. "Untuk anggaran navigasi yg 470 tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan tyo maupun pak mindo, itu murni APBD 2012," tandasnya. (sov/rif)